

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah telah menjadi hal yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Menurut Arditia (2012) otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting yaitu sebagai sumber pembiayaan dan tolok ukur pelaksanaan otonomi daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, pengelolaan kekayaan dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari PAD dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah, dan sumber penerimaan daerah lainnya.

Setiap daerah di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak di daerahnya. Seperti Kota Sukabumi, merupakan salah satu kota yang cukup berkembang dalam bisnis hiburan, misalnya bisnis karaoke. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan hiburan, membuat bisnis karaoke kian menjamur di Kota Sukabumi seperti Cozy Family Karaoke, Jazz Family Karaoke, Happy Puppy Karaoke, Diva Karaoke, Inul Vista

Family KTV, dan beberapa tempat karaoke lainnya. Sektor ini dinilai masih menjadi lahan bisnis yang potensial bagi para pebisnis di Kota Sukabumi.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Wulandari dengan judul **Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013** dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang (periode 2009-2013).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Vidya Paramita dengan judul **Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)** dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Periode 2006-2012).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Thomas Sanjaya dengan judul **Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung: Survei Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung** dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. Secara simultan pajak hiburan dan pajak parkir berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Effendi dengan judul **Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah: Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi** kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hiburan dan pajak reklame memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan dan pajak hotel merupakan sumber pendapatan yang cukup signifikan kontribusinya bagi berbagai daerah.

Menurut Yudi Yustiawan (2012), Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sukabumi, DPPKAD optimis akan mencapai target PAD dikarenakan PAD dari sektor pajak restoran dan pajak hiburan, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan jasa di Kota Sukabumi, mengalami peningkatan. Yudi juga mengungkapkan bahwa pajak hiburan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD Kota Sukabumi. Lebih lanjut Yudi menyatakan, pada tahun 2012 pencapaian PAD Kota Sukabumi dari sektor pajak hotel, sudah mencapai 80 persen dari target yang telah ditentukan. Bisnis hotel di Kota Sukabumi saat ini dapat dikatakan cukup berkembang ke arah yang menjanjikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DPPKAD pajak hiburan dan pajak hotel mengalami penurunan yang dapat dilihat dari hasil perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Sukabumi dari tahun 2009 sebesar 6,16% hingga tahun 2013 sebesar 4,34%. Begitu pula dengan hasil perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Sukabumi

dari tahun 2009 sebesar 7,44% hingga tahun 2013 sebesar 4,22%. Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh dari pajak hotel dan pajak hiburan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yang dituangkan dalam penelitian berjudul:

“Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar kontribusi dari pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Sukabumi?
2. Apakah terdapat pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Sukabumi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasi diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi dari pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Akademis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman mengenai seberapa besar pengaruh pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan kajian peneliti lainnya dalam pengembangan lebih lanjut khususnya mengenai pajak daerah khususnya pajak hiburan dan pajak hotel.

2. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi

Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan evaluasi mengenai efektivitas pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak Kota Sukabumi.

3. Bagi Pengusaha Pusat Hiburan dan Perhotelan di Kota Sukabumi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengusaha yang bergerak dalam bidang pusat hiburan dan perhotelan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak karena melalui pembayaran pajak tersebut para pengusaha telah berkontribusi dalam pembangunan Kota Sukabumi.